

DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA – JEPANG DI ERA REFORMASI

Disusun oleh:

Rizki Hakiki Valentine

Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang

Universitas Indonesia

I. PENDAHULUAN

Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan di tanah air Indonesia pada 17 Agustus 1945 ternyata bukan merupakan akhir dari hubungan Indonesia dan Jepang. Pasca pendudukannya di Indonesia, Jepang masih tetap melancarkan kegiatan kerjasama dengan Indonesia yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1920-an. Sejarah memang mencatat banyak sekali kerugian dan duka akibat pendudukan Jepang di Indonesia namun hal itu tidak menghalangi terjalinnya sejumlah kerjasama menguntungkan dalam berbagai bidang yang dilakukan kedua negara. Dengan potensi kekayaan alam dan populasi penduduk yang besar, Indonesia merupakan negara sumber pemasok bahan dasar industri sekaligus pangsa pasar produk Jepang. Sebaliknya, Jepang sebagai negara dengan kepesatan laju teknologinya dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi untuk mempercepat laju pembangunannya.

Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan juga anti imperialis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat. Politik luar negeri era Soekarno juga dikenal dengan politik konfrontasinya seperti contohnya adalah konfrontasi mengenai ganyang Malaysia.

Berbeda pada era Soekarno, presiden Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Hal ini

membuat Jepang menanamkan investasinya secara besar besaran dan tidak ragu untuk memberi berbagai macam bantuan kepada Indonesia.

Lengsernya Soeharto dari kursi kepemimpinannya menandakan bahwa era orde baru sudah berakhir dan terjadi reformasi dalam pemerintahan. Pemerintahan yang otoriter ala Soeharto berubah menjadi sistem pemerintahan yang demokratis yang dijalankan oleh presiden-presiden sesudah Soeharto yaitu BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Sebuah kebijakan dan juga politik luar negeri yang diterapkan di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh isu-isu dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi dan terjadi didalam sebuah negara tersebut. tiap-tiap isu dan masalah yang sedang dihadapi didalam sebuah negara tersebut tentu saja akan membentuk politik luar negerinya secara beragam.

Selain dipengaruhi oleh isu-isu dan juga masalah-masalah yang sedang dialami oleh negara tersebut, faktor adanya pergantian kepemimpinan oleh seorang penguasa negara atau presiden juga ikut mengatur dan kemudian membentuk sebuah kebijakan dan kerjasama luar negeri antarnegara. Kerjasama Indonesia dengan Jepang, misalnya, kedua negara ini kian menunjukkan hubungan yang akrab dari waktu ke waktu. Selain pada pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia seperti Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia, baik isu atau masalah tersebut berasal dari dalam negeri seperti isu mengenai Hak Asasi Manusia, isu referendum, isu ekonomi maupun politik maupun isu atau masalah yang berasal dari luar negeri dan juga dunia internasional seperti contohnya isu mengenai konflik ataupun perang, isu terorisme dan juga perdamaian dunia.

II. HUBUNGAN JEPANG – INDONESIA DI ERA REFORMASI

Pada era reformasi yang mana saat itu Indonesia dipimpin oleh B.J Habibie sebagai presiden baru yang menggantikan Soeharto kemudian berusaha memperbaiki pemerintahan yang telah carut marut dengan segala permasalahan yang ada terutama akibat dari krisis ekonomi yang terjadi sejak era orde baru. B.J Habibie kemudian berusaha menata kembali pemerintahan dalam negeri dengan fokus pada masalah-masalah domestik begitu juga dengan politik luar negeri Indonesia yang kembali dibangun. Politik luar negeri pun mulai dibangun kembali dari awal, tujuan utama politik luar negeri Indonesia yang awalnya hanya fokus pada pembangunan dan perbaikan ekonomi serta keamanan negara kemudian bergeser

pada tujuan utama pemulihan nama baik Indonesia seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius. Tidak hanya menangani masalah ekonomi yang akut, tetapi juga harus menyelesaikan masalah HAM yang dihasilkan oleh pemerintahan terdahulu. Pemerintah berusaha mendapatkan dukungan internasional dengan beragam cara, diantaranya, pemerintahan Habibie mengasalkan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampaui kuat, namun dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi citra positif kepada dunia internasional memberikan dukungan bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai.

Kemudian berakhirnya pemerintahan Presiden BJ Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Keinginannya menjalin kerjasama luar negeri dengan Israel pun menuai banyak protes dalam negeri.

Dapat dilihat pada dua rezim pemerintahan setelah orde baru, hubungan Jepang dan Indonesia tak tampak akrab. Arus hubungan Indonesia dan Jepang kembali pasang ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mulai memerintah.

i. Hubungan Jepang Indonesia dalam Bidang Ekonomi

Bantuan pendanaan kegiatan pembangunan yang diberikan Jepang selama ini telah menempatkannya sebagai negara penyumbang terbesar bagi Indonesia. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah *Official Development Assistance* (ODA). Sejak tahun 1987, Indonesia termasuk negara terbesar yang menyerap ODA Jepang. Analisa terhadap sejarah keberadaan ODA menjadi bahasan yang menarik, dengan adanya fakta bahwa secara kuantitatif menunjukkan nilai ODA meningkat namun secara kualitatif tidak demikian. Selain itu dengan besaran nilai ekspor kekayaan laut Indonesia ke Jepang, perlu dicermati dengan kemungkinan munculnya dampak negatif dan krisis kelangkaan kekayaan laut sebagai akibat pemanfaatan yang tidak bijak.

Pergantian pemimpin negara tentu saja memberikan dampak pada pemberian bantuan Jepang untuk Indonesia. Dalam kebijakan pemerintahan Soeharto, ODA ditempatkan sebagai salah satu sumber dana yang penting dalam APBN. Kontribusi ODA mencapai seperlima dari jumlah total pendapatan negara, dan Jepang tercatat sebagai pemberi bantuan terbesar bagi Indonesia dengan mengalokasikan 16% dari total ODA Jepang ke Indonesia.

Sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang cepat, Jepang dapat menjadi wacana dalam pengelolaan ekonomi nasional Indonesia. Analisa tentang sistem penyusunan anggaran belanja negara di Jepang menunjukkan adanya keunikan karena tidak mengikuti standar internasional. Terlepas dari adanya kelemahan sistem ini, banyak kelebihan yang bisa dipelajari dan dipikirkan kemungkinan pengembangannya di Indonesia.

Selain ODA, Jepang juga menawarkan proposal pembentukan Free Trade Agreement (FTA) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tawaran pembentukan FTA dari Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi tersebut membuahkan tindak lanjut kerjasama Indonesia Japan economic Partnership Agreement (IJEPA). Kerjasama IJEPA ini rupanya sangat didukung oleh kerjasama Jepang dengan ASEAN karena dengan merangkul ASEAN, Jepang memiliki jalur masuk perdagangan ke negara negara Asia tenggara yang lebih mudah dan menguntungkan. Selain itu, liberalisasi pasar di Indonesia membuat produk-produk Jepang menjadi lebih mudah masuk ke Indonesia.

IJEPA yang salah satu tujuannya adalah peningkatan sektor investasi dinilai sangat membantu Jepang dalam memperbaiki iklim investasi Jepang yang mengalami kemerosotan pasca krisis Asia pada tahun 1997.

Setelah Presiden Megawati Soekarno Putri meninggalkan kursi kepresidenannya, tindak lanjut economy partnership diteruskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2004, menteri perdagangan Indonesia dan Jepang menyepakati Joint Study Group sebagai upaya awal penjajakan kegiatan ekonomi partnership. Akhirnya negosiasi akhir mengenai IJEPA pada tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo.

Penandatanganan *Japan-Indonesia Partnership Agreement* (JIEPA) pada bulan Agustus 2007, menandai era baru yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Tidak saja dalam tercapainya kesepakatan pengaturan mobilisasi tenaga kerja kedua negara, tetapi cakupan kerjasama meluas dengan perjanjian ini. Termasuk di dalamnya kerjasama dalam bidang teknologi. Kupasan tentang transfer teknologi dari Jepang kepada Indonesia dikaitkan dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai sosial yang dimiliki kedua negara disajikan secara ringan.

Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang semakin menguat yang ditandai dengan meningkatnya volume perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Jepang selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2011 adalah sebesar USD 35,1 milyar, meningkat sebesar 29% dari periode yang sama tahun 2010. Total nilai perdagangan Indonesia-Jepang tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar USD 42,7 milyar dan USD 28,4 milyar. Bagi Jepang, Indonesia masih merupakan sumber utama pasokan energi, yakni gas dan batu bara untuk industri serta sumber daya alam lainnya seperti timah dan nikel.

Investasi Jepang di Indonesia pada umumnya disektor:

- (1) *transportation vehicle & other transportation industry;*
- (2) *metal, metal goods, machinery & electronic industry,*
- (3) *trading & repair industry, food industry*
- (4) *rubber & plastic goods industry.*

Peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara tercermin pada beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Partisipasi pada *International Jewelry* di Tokyo, 26-29 Januari 2011, dan di Kobe, 11-13 Mei 2011.
- b. Fasilitasi kunjungan Ketua Keidanren (Federasi Bisnis Seluruh Jepang) beserta rombongan ke Indonesia, 13-15 Februari 2011.

- c. Fasilitasi kunjungan *Federation Exchange Council* ke Jakarta, 20-23 Februari 2011.
- d. Partisipasi pada *Food Expo (Foodex)* 2011, 1– 4 Maret 2011.
- e. *Industrial Familiarization Mission* di Nagoya, 9-10 Maret 2011.
- f. Seminar investasi “*Progressing Indonesian Economy and ASEAN*”, 13-14 Mei 2011 di Osaka.
- g. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Energy Policy Dialogue* kedua di Bali, 31 Mei – 1 Juni 2011.
- h. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Coal Policy Dialogue* ketiga di Bali, 30 Mei 2011.
- i. Penyelenggaraan *The 12th Indonesia-Japan Energy Round Table (IJERT)* di Tokyo, 17 Oktober 2011.
- j. Penyelenggaraan *Indonesia-Japan Joint Economic Forum (IJJEF)* Ke-3 di Bali, 18 November 2011.

Sebagai bentuk penghargaan Pemerintah RI kepada mantan PM Fukuda, yang mengetuai JAPINDA (*Japan Indonesia Association*), atas upaya-upayanya dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, maka Pemerintah RI menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Mahaputra Adipradana. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Menlu RI, atas mandat Presiden RI, kepada mantan PM Jepang Yasuo Fukuda di Tokyo, 10 November 2011.

Terkait dengan kerja sama bantuan keuangan, Pemerintah RI dan Jepang pada tahun 2011 telah menandatangani 3 (tiga) kesepakatan antara lain:

1. *Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan for the Purpose of Contributing to the Implementation of the Project for Urgent Reconstruction of East Pump Station of Pluit in Jakarta* (Jakarta, 20 Januari 2011).
2. *Financial Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan regarding the Contribution of the Government of Japan as the Co-chair of the ARF Disaster Relief Exercise Year 2011 to be Held in Manado, Indonesia* (Manado, 13 Maret 2011).

3. *Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on the Loan of the Amount of 8,291,000,000 Yen* (Jakarta, 10 Maret 2011).

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam sektor ekonomi dan investasi tidak hanya berhenti sampai di situ. Dilansir dari situs berita liputan6.com, pada akhir tahun 2013, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Jepang semakin mempererat hubungan dengan menyepakati kerjasama dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pembangunan infrastruktur agar dapat tumbuh bersama berdasarkan kesepakatan pada tingkat menteri untuk lebih mendorong kerjasama Metropolitan Priority Area (MPA) di wilayah Jabodetabek.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik tren positif perdagangan bilateral dengan Jepang, yang mencatat pertumbuhan rata-rata lebih dari 11% dalam lima tahun terakhir (2008-2013). Adapun total nilai perdagangan Januari-Agustus 2013 telah mencapai US\$ 31,24 miliar.

Berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Presiden Joko Widodo yang pada Maret 2015 melakukan kunjungan ke Jepang dan Tiongkok guna mempererat hubungan kerjasama dalam sektor ekonomi. Di Jepang Presiden Joko Widodo menghadiri forum bisnis bersama dengan 1000 pengusaha Jepang. Di sana, Jepang memandang Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan perekonomian yang mantap serta memiliki masyarakat kelas menengah yang terus tumbuh sehingga meningkatkan keinginan Jepang menanamkan modalnya di Indonesia. Indonesia juga dianggap sebagai sosok pemimpin ASEAN yang memegang peranan besar dalam stabilitas wilayah dan keakmuran dengan populasi dan GDP Indonesia yang mencapai 40 % dari populasi dan GDP ASEAN. Dalam kunjungan itu, Indonesia menekankan posisi Jepang sebagai mitra strategis sehingga Indonesia siap membuka peluang kerjasama yang lebih luas dan progresif.

ii. Hubungan Jepang Indonesia dalam Sektor Budaya dan Pariwisata

Setelah memutuskan untuk menekan jalur kekuatan militer dalam upaya berhubungan antar bangsa, Jepang menggalakkan soft diplomacy-nya. Salah satu dari soft diplomacy itu adalah melalui sektor kebudayaan dan hiburan. Diplomasi budaya digunakan untuk memperkuat hubungan antar negara, agar negara yang dituju lebih

mengenal negaranya dalam hal ide, nilai – nilai, tradisi dan berbagai macam aspek budaya, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kepentingan nasional.

Semenjak akhir tahun 1990-an berlanjut hingga tahun 2000-an ini, jalur peredaran *anime* di Indonesia lebih banyak melalui rental atau toko *anime* dalam format VCD/DVD. Pada periode 2000 ini, kepopuleran *anime* sudah begitu sangat luar biasa sampai kepada kondisi yang sulit dibayangkan noleh para otaku (penikmat *anime*) sebelumnya. Trend *anime* ini juga didukung dengan munculnya distributor resmi yang berusaha memenuhi kebutuhan otaku akan masuknya lebih banyak *anime* di Indonesia.

Kemudian pada tahun-tahun terakhir ini *anime* mulai kembali menjadi booming lagi di Indonesia. Seperti yang dapat terlihat dari kepopuleran *anime* Naruto yang menghebohkan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya porsi tayang untuk *anime* yang mulai mendominasi program film animasi di berbagai stasiun televisi.

Perlu disadari dalam era globalisasi sekarang ini, penyebaran informasi serta hubungan ekonomi hampir tidak lagi mengenal batas. *Anime* menjadi bagian dari pop culture di seluruh dunia, dan Jepang sendiripun sangat gencar mempromosikan *anime*. Kepopuleran *anime* dan manga Jepang di Indonesia dapat disaksikan siapapun. Sebagai akibatnya, budaya Jepang pun menjadi sebuah tren di Indonesia. Disana-sini dapat ditemukan bentuk-bentuk asimilasi budaya Jepang.

Bagi Jepang *anime* merupakan salah satu media diplomasi yang sangat efektif dengan menawarkan cerita mengenai Jepang melalui visualisasi apik dan menggambarkan cerita mengenai Jepang mulai dari sejarah, budaya, gaya hidup, karakter masyarakat, serta kondisi sosial. Jadi secara tidak langsung masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, telah tersuguhi berbagai gambaran tentang Jepang, yang tercipta memiliki akar budaya yang begitu adi luhung, dan memasuki masa modernpun tidak lupa atau meninggalkan budaya nenek moyang yang selalu jadi kebanggaan bangsa Jepang.

Dengan kehadiran *anime* di Indonesia semakin mempertegas jati diri bangsa Jepang sebagai bangsa yang besar kepada masyarakat dan menjadikan *anime* sebagai sub-kultur yang semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya remaja. Hingga Hal ini membuat Jepang hampir dapat disejajarkan dengan Amerika Serikat dan film Hollywoodnya dalam segi popularitas dan pengaruh budaya pop-nya di Indonesia.

Sebagaimana yang dikatakan Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* : *"When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men"*.

Bedasarkan apa yang dikatakan Morgenthau dalam bukunya tersebut, yaitu siapapun yang memiliki Power atau kekuasaan, Maka dia akan dapat mengatur bahkan mendikte siapapun yang diinginkannya. Begitu juga hal yang dilakukan Jepang, terhadap unit politik diluar negaranya, melalui powernya Jepang terutama dari segi Ekonomi, yang terkenal dengan Diplomacy by ATM-nya, telah menancapkan pengaruhnya terhadap negara lain, terutama negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Setelah sukses menanamkan pengaruhnya dalam sektor ekonomi, tentu saja hubungan ini memberikan pengaruh pada sektor lain, misalnya politik. Negara-negara yang sudah bergantung secara ekonomi tidak sulit untuk ditanamkan pengaruh politik.

Selain dalam dunia hiburan, Jepang dan Indonesia pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani perjanjian kerjasama pariwisata. Perjanjian ini dibuat untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung baik ke Indonesia maupun Jepang. Yang perlu dilakukan demi mencapai tujuan tersebut antara lain, melalui kampanye terukur, pertukaran misi untuk mempromosikan pariwisata dan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang kepariwisataan itu juga melibatkan organisasi yang bergerak dalam sektor kepariwisataan untuk mengurangi halangan dan kesulitan dalam kepariwisataan.

Untuk mendukung kerjasama ini biro perjalanan Jepang Japan Association of Travel Agent (JATA) telah mengirimkan misinya sebanyak dua kali ke Bali mengingat pernah terjadi pemboman pada tahun 2002 untuk memastikan keamanan dan keselamatan para wisatawan.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa budaya pop dan pariwisata merupakan hal sayang cukup diperhatikan oleh kedua negara, sebab dengan kelancaran kerjasama dalam sektor kepariwisataan maupun industri budaya pop, kedua negara dapat mempererat hubungan kerjasama dalam sektor sosial, budaya dan juga ekonomi.

iii. Hubungan Jepang Indonesia dalam Bidang Politik

Kedekatan hubungan politik Indonesia dengan Jepang bisa ditunjukkan dengan kedekatan dan keluwesan hubungan antar kepala negara Indonesia dan kepala pemerintahan Jepang selama puluhan tahun. Keeratan hubungan politik antar dua negara telah membawa konsekuensi logis membaiknya hubungan Indonesia dengan Jepang dalam masalah ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan.

Jatuhnya Soeharto, membawa perubahan cukup besar dalam sistem perpolitikan Indonesia. Tekanan agar pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi politik dan ekonomi gencar dilakukan oleh masyarakat domestik dan internasional. Hal ini juga turut mempengaruhi kebijakan ODA Jepang setelah jatuhnya Soeharto.

Hal menarik pada periode ini adalah, pada tahun 1999 Jepang memberikan bantuan di bidang politik yaitu bantuan untuk melaksanakan Pemilu, baik dengan memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia maupun ikut serta mengirimkan pemantau pemilu internasional. Hal ini merupakan yang pertama dalam sejarah ODA Jepang di Indonesia. Akan tetapi perlu dicatat bahwa pada saat Pemilu 1999, Jepang adalah negara yang termasuk lambat memberikan respon atas permintaan dukungan Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu. Alasan yang dikemukakan adalah saat itu Pemerintah Jepang sedang mencari dan merumuskan skema dana yang harus digunakan karena sebelumnya tidak ada alokasi dana untuk bantuan pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Walau terkesan agak lambat dalam merespon tuntutan reformasi politik di Indonesia, Pemerintah Jepang mulai aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung demokratisasi seperti melibatkan NGO sebagai partner. Selain itu, dalam *Country Assistance Strategy for Indonesia* tahun 2004, pemerintah Jepang juga dengan nyata menempatkan penciptaan masyarakat yang demokratis dan adil (*“creation of a democratic and equitable society”*) sebagai pilar kedua dalam prioritas area bantuan. Adapun kegiatan yang didesain sebagai bagian dari pilar kedua tersebut adalah pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan pertanian dan perikanan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan jasa publik di bidang pendidikan, kesehatan dan obat-obatan; reformasi pemerintah di bidang hukum (*judiciary*), polisi (*police service*), bantuan untuk desentralisasi; serta pemeliharaan lingkungan dan pencegahan bencana.

Jepang terlihat mulai menformulasikan berbagai kegiatan/program yang mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan makmur, seperti

bantuan untuk pelaksanaan pemilu, desentralisasi, reformasi pemerintahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Akan tetapi apabila dicermati dari pembahasan di atas, Jepang terkesan sangat hati-hati dalam mengimplementasikan proyek pembangunan di bidang politik (demokratisasi). Kepercayaan bahwa pembangunan masyarakat yang demokratis akan menuntut ketidakstabilan politik, merupakan salah satu alasan mengapa Jepang terlihat lambat merespon tuntutan demokratisasi atau reformasi politik di Indonesia.

Intensitas kerja sama politik RI – Jepang ditandaidengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan Presiden RI ke Jepang, 16-18 Juni 2011;
- b. Pertemuan Presiden RI dengan *Special Envoy* Jepang, Mr. Katsuya Okada di sela-sela pertemuan *Bali Democracy Forum IV* di Bali, 8 Desember 2011;
- c. Dialog Strategis Tingkat Menteri Luar Negeri yang Pertama di Tokyo, 17-18 Februari 2011;
- d. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di Jakarta, 9 April 2011 (dalam Kesempatan *Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting*);
- e. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di Tokyo, 17 Juni 2011;
- f. Dialog Strategis Tingkat Menlu Ke-2 di Bali, 21 Juli 2011;
- g. Pertemuan Menlu RI dan Menlu Jepang di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, 21 September 2011;
- h. Dialog Strategis Tingkat Menlu Ke-3 di Jakarta, 13-14 Oktober 2011; dan
- i. Pertemuan informal Menlu RI dan Menlu Jepang di Tokyo, 10 November 2011.

iv. Hubungan Jepang Indonesia dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Jepang menganggap harus ada kerjasama yang jelas dalam hal antibajak laut dan anti perompakan dan Indonesia sudah memiliki undang-undang pelayaran yang sangat penting bagi kawasan. Selain perompakan, Jepang juga memberi perhatian pada masalah terorisme. Untuk itulah bekerjasama dengan Indonesia perihal isu terorisme adalah hal yang diperlukan. Hal yang mendasari keputusan Jepang ini adalah kenyataan bahwa Indonesia dinilai memiliki banyak pengalaman dalam kasus terorisme dan memiliki pengalaman menangani kasus terorisme.

Lima hal utama dalam kerjasama pertahanan keamanan dan militer antara Indonesia dan Jepang adalah pendidikan, latihan, sumber daya manusia, industri pertahanan, penanganan terorisme, dan manajemen penanggulangan bencana.

Kerjasama militer Indonesia dan Jepang diwujudkan melalui sinergi antara TNI angkatan darat dan pasukan beladiri Jepang. Memang, setelah PD II, konstitusi Jepang melarang memperkuat angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata mereka sebut sebagai pasukan beladiri. Dalam pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jenderal eiji Kamizuka, Indonesia mengundang Jepang untuk mengadakan latihan gabungan yang diselenggarakan di Jawa Barat.

Selain kerjasama di atas, pemerintah Indonesia dan Jepang juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Asia Timur. Kedua negara sepakat untuk memelihara dan berkontribusi aktif dalam memelihara stabilitas kawasan. Indonesia mengerti tentang keinginan Jepang untuk lebih berperan lebih luas dalam bidang keamanan dengan tujuan bisa ikut berkontribusi dalam penciptaan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Sekaligus Indonesia menyarankan agar dibangun kerja sama lebih erat lagi antara Jepang dan Indonesia, antara Jepang dengan negara-negara di kawasan ASEAN agar semua dapat berkontribusi pada perdamaian yang sama-sama diinginkan oleh semua pihak.

Dalam bidang penanganan bencana alam, Jepang sangat aktif menyalurkan bantuan ke beberapa daerah di Indonesia yang dilanda bencana. Bantuan Jepang kepada Aceh pasca gempa bumi dan tsunami meliputi berbagai bentuk:

No	Bentuk Bantuan	Keterangan
1	Bantuan Darurat Sebesar US\$ 390.000	berupa : tenda, selimut, genset
2	Bantuan Hibah Bilateral	1. US\$ 1,5 juta, untuk pengadaan makanan darurat dan peralatan medis. 2. US\$ 146 juta, untuk barang bantuan darurat dan rekonstruksi di Aceh.

3	Pengiriman Tim Medis Darurat Jepang	
4	Pengiriman Pasukan Beladiri Jepang	Terdiri dari personil AL, AD, AU dan Join Staff Office, untuk mendukung operasi bantuan dalam bidang pengangkutan barang melalui udara, serta melaksanakan pencegahan epidemic di Indonesia.
5	Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta Jepang	pengiriman 1540 unit kantong mayat oleh JICA, dan bantuan lainnya yang bersifat barang dan jasa.
6	Bantuan melalui LSM Jepang “AMDA International” (Perawatan Trauma dan Kesehatan Fisik)	<p>a. Dengan tujuan memberikan kontribusi bagi pembangunan kembali pasca tsunami dan konsolidasi perdamaian di Aceh, pemerintah Jepang melalui “bantuan Hibah kepada LSM Jepang” telah memutuskan untuk memberikan bantuan hibah sebesar US\$ 246,014 (sekitar Rp.2.2 miliar).</p> <p>b. Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha pembinaan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik di kalangan anak-anak, baik di daerah-daerah yang pernah dilanda tsunami maupun di daerah-daerah yang dulu menjadi korban konflik. Kedua proyek tersebut adalah sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Perawatan Trauma bagi Anak-anak Korban Tsunami. Nilai bantuan : US\$ 82.170 • Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk meringankan trauma akibat tsunami pada anak-anak yang sampai sekarang

		<p>masih tinggal di barak-barak pengungsian di Banda Aceh dan Aceh Besar, yaitu melalui berbagai kegiatan kreatif dan membaca di sejumlah perpustakaan di bawah pimpinan para pemuda dalam komunitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek Rehabilitasi Komunitas melalui Perawatan Kesehatan Mental dan Fisik. <p>Nilai bantuan : US\$ 163.844</p>
--	--	---

Sebaliknya, Indonesia juga memberikan bantuan kepada Jepang ketika Jepang dilanda bencana berupa bantuan finansial.

Pemerintah dan rakyat Indonesia memberikan perhatian dan simpati yang besar terhadap bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang, 11 Maret 2011. Sebagai bentuk keprihatinan tersebut, Indonesia telah memprakarsai pertemuan *Special ASEAN-Japan Ministerial Meeting*, 9 April 2011 untuk menggalang solidaritas kawasan terhadap bencana yang melanda Jepang. Pada kesempatan kunjungan ke Jepang, 16-18 Juni 2011, Presiden RI melakukan peninjauan ke wilayah bencana di Kesennuma. Pada kesempatan tersebut secara simbolis juga diserahkan dana bantuan bagi pemulihan dan rekonstruksi Kota Kesennuma sebesar USD 2 juta kepada Walikota Kesennuma oleh Menlu RI, serta penandatanganan prasasti tanda persahabatan dan solidaritas rakyat Indonesia bagi masyarakat Jepang oleh Presiden RI.

Upaya-upaya pemberian bantuan dan evakuasi WNI yang menjadi korban gempa Maret 2011 antara lain:

- KBRI Tokyo melakukan evakuasi dari wilayah bencana menuju ke posko pengungsian di Sekolah RI di Tokyo (SRIT).
- Evakuasi WNI gelombang pertama berhasil merelokasi sebanyak 112 WNI yang ditampung di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Evakuasi WNI gelombang kedua ke Tokyo telah merelokasi sebanyak 114 WNI.
- Selain itu juga diberikan pertolongan pertama dan bantuan logistik untuk WNI di wilayah bencana, antara lain berupa air minum botol, makanan instan, selimut dan obat-obatan.

- Kemlu RI mengirimkan *Relief Team* pada tanggal 12 Maret 2011 dan mendirikan posko di wilayah Sendai, yang menjadi posko ASEAN.
- Pemulangan WNI ke Indonesia dilakukan dalam 9 tahap yang dilakukan dari tanggal 15-26 Maret 2011 dengan total jumlah WNI sebanyak 263 orang. Pada tanggal 15 Maret 2011, 99 WNI yang dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Garuda GA 885 diterima oleh Menlu RI dan diserahkan kepada keluarga.
- Pada tanggal 17 Maret 2011, tim satuan reaksi cepat penanggulangan bencana yang berasal dari Kementerian Kesehatan, TNI, BNPB, dan Basarnas dilepas oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- Pada tanggal 18 Maret 2011 telah berhasil ditemukan 17 ABK asal Indonesia di kapal Yahata Maru 35.

v. Hubungan Jepang Indonesia dalam Sektor Energi dan Infrastruktur

Kerjasama di sektor industri manufaktur dan energi menjadi fokus utama bagi Jepang. Alasan mengapa Jepang lebih tertarik kepada sektor ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Salah satu alasannya adalah keperluan timbal balik antara kedua belah negara, yaitu bahwa industri manufaktur sudah lebih serius digarap oleh Jepang dan membutuhkan jaminan ketersediaan pasokan bahan baku untuk industri tersebut, seperti batubara dan gas. Pihak Indonesia terbantu pula dengan saling berbagi teknologi manufaktur. Sudah bisa ditebak juga tujuan lain untuk ekspansi bisnis pemasaran mesin-mesin pembangkit energi Jepang ke Indonesia.

Singkat kata, hubungan Indonesia dan Jepang memang sangat menonjol dalam bidang ekonomi dan penanaman investasi, akan tetapi bukan berarti sektor energi dan infrastruktur dipandang sebelah mata. Sektor energi dan infrastruktur tetap menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Jepang pasca orde baru.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah Jepang menyatakan komitmennya untuk membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan mengalokasikan dana sebesar 100 miliar yen (sekitar Rp 8 triliun).

Indonesia, pada 2013 menawarkan beberapa sektor yang menarik para pengusaha Jepang agar turut berpartisipasi seperti energi yang meliputi; batubara, pembangkit listrik tenaga panas bumi geotermal, dan lain lain.

Khusus untuk kerjasama sektor energi, tampaknya Jepang lebih fokus untuk mengembangkan potensi batubara yang masih tersimpan sebanyak 5,476 juta ton di perut bumi Indonesia dan panas bumi sebesar 27 GW, walaupun potensi dari pengembangan Renewable Energy lainnya tidak kalah penting, seperti yang terlihat pada Tabel 1 yaitu; Tenaga Air (Hydropower) 76.17 GW, Biomassa 49.81 GW, Tenaga Angin (Wind Power) dengan laju rata-rata 3-6 meter/detik, dan Tenaga Surya (Photovoltaic) dengan rata-rata radiasi matahari sebesar 4.8 kWh/m²-hari. Potensi Tenaga Angin di Indonesia tidak terlalu besar dan itupun hanya terdapat di beberapa pesisir pantai saja, tetapi potensi Tenaga Surya sangatlah besar karena posisi Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa. Dalam hal pengembangan RE, Jepang bisa dikategorikan sebagai negara yang sudah maju dalam semua teknologi RE yang tidak kalah dengan negara maju lainnya seperti Jerman dan Amerika Serikat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mengharapkan keikutsertaan pengusaha Jepang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi, sebab Indonesia sangat membutuhkan tambahan dari pembangkit tersebut. Potensi energi dan finansial sangat besar manfaatnya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Kiprah Jepang sebenarnya bisa menarik simpati masyarakat Indonesia untuk bisa menerima segala macam kegiatan industri, produk, dan investasi Jepang di Indonesia.

Pemerintah Jepang juga menawarkan proyek pembangunan kereta api ekspres Jakarta-Surabaya dan siap melaksanakannya. Sementara itu Indonesia menekan percepatan kerjasama pembangunan antara Indonesia dan Jepang. Selain itu, di masa pemerintahan Joko Widodo, Jepang memiliki kiprah luar biasa besar dalam pembangunan pelabuhan Cilamaya di pulau Jawa.

III.KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang pada era reformasi memiliki perbedaan dengan hubungan kerjasama pada era orde baru.

Pergantian pemimpin negara memberikan pengaruh terhadap bagaimana negara menjalankan kebijakan politik dan diplomasi luar negerinya. Dapat dilihat kembali bahwa sepak terjang Jepang sempat melemah setelah Presiden Soeharto lengser dari kursi kepemimpinannya. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cara

yang berbeda dalam pemerintahannya.. Selain karena masa jabatan yang pendek, kedua mantan presiden tersebut memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dengan beberapa presiden setelahnya. Pada masa itu, keterlibatan Jepang dalam berbagai sektor di Indonesia tidak terlalu menonjol seperti sekarang.

Kerjasama Jepang dan Indonesia di era reformasi menunjukkan bahwa kedua negara sudah memiliki rasa saling percaya dan keakraban. Selain itu peluang kerjasama pun menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada bisnis dan ekonomi, Jepang juga memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bekerjasama dalam sektor energi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya pop, teknologi, dan lain-lain.

Dengan begitu Jepang mendapatkan popularitas di tanah air Indonesia sebagai negara maju yang berpartner dengan Indonesia, bukan lagi sebagai penjajah perang seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Hal ini terbukti dengan masyarakat Indonesia yang semakin terbiasa dengan keberadaan orang Jepang yang berbisnis di Indonesia. Selain itu studi kejepangan di Indonesia juga menjadi kian populer didukung dengan adanya budaya pop Jepang dan peluang bekerja di perusahaan multinasional Jepang yang kini berinovasi ke Indonesia.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- “Japan : Country Profile”, United States Departement of States, <http://www.state.gov..>
- “Japan Profile Country : International Economic Cooperation Policy of Japan”, <http://www.englishbritannica.com>
- Amari, A., 2008. Pentingnya JIEPA. *Kompas*, [Online] 30 Juni. Tersedia di:<http://nasional.kompas.com/read/2008/06/30/01251714/pentingnya.jiepa>
- Andy Christine Yuliani, *Studi tentang animasi jepang (anime) dan perkembangannya di Indonesia*<http://digilib.petra.ac.id/jiunkpe/s1/jdkv/2003/jiunkpe-ns-s1-2003-42499169-7234-animechapter4.pdf>.
- Bandoro, B., 1994. Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia. Dalam: B. Bandoro, ed. *Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS
- Dennis Yasutomo, “The Manner of Giving, Strategic Aid and Japanese Foreign Policy” dalam Daulah Khoiriaty Djaldan, *Japan’s Foreign Aid Policy To Indonesia Its Implication on Japan-Indonesia Relations : Thesis, International University of Japan, 1991*

Downer, Alexander. (2000). *East Timor - Looking Back on 1999*. Australian Journal of International Affairs

Dr. Emil Constantinescu. "What is Cultural Diplomacy?" diakses dari http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy

DJPEL, Direktorat Jenderal Pemanfaatan Energi Listrik, Dept. Pertambangan dan Energi – RI, Blue Print Pengelolaan Energi Nasional 2005 -2025

Hans morgenthau, diakses dari http://www.absoluteastronomy.com/topics/Hans_Morgenthau

Mashad, Dhurorudin, 2008. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi. Dalam Ganewati Wuryandari. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar. Hal

Robison, Richard and Vedi R Hadiz. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge. 2004.